



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. EKO WAHYU PRASETYO
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 894113

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.500.000.000

1. Bangunan Seluas 194 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 835.000.000

1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA CAMRY 2.5 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV RM 3 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT 2021 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOTOR, BAJAJ PULSAR 220 DTS - IF Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 3.5 AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 78.980.023

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.413.980.023



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.413.980.023

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.